

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN MASJID (STUDI KASUS MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA)

Faris Sabili¹, Dadang Romansyah², dan Roni Hidayat³

*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Jl. Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat 16517
Email: sabilifaris@gmail.com*

ABSTRACT

This research aims to reveal the problems of accountability and transparency in the financial statements of the Jogokariyan Mosque. The research method used is descriptive qualitative. The main source of research data was obtained through in-depth interviews with the management of the Jogokariyan Mosque. The results of the study indicate that the financial statements of the Jogokariyan Mosque have been presented in a transparent and accountable manner. In terms of accountability, it is evidenced by the existence of financial reports prepared by the mosque management, especially the treasurer in detail as a form of responsibility of the management to donors, in terms of transparency it is proven by the ease of access to financial information to worshipers and donors through mass media owned by the mosque in the form of information boards, websites, and the Eid al-Fitr bulletin so that the funds received and utilized by the mosque are clearly recorded.

Keywords : Transparency, Accountability, Financial Reports

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan Masjid Jogokariyan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber utama data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen Masjid Jogokariyan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Masjid Jogokariyan telah disajikan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal akuntabilitas, terbukti dengan adanya laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen masjid, terutama bendahara secara rinci sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada para donatur, dalam hal transparansi terbukti dengan mudahnya akses ke informasi keuangan bagi jamaah dan donatur melalui media massa yang dimiliki masjid berupa papan informasi, situs web, dan buletin Idul Fitri sehingga dana yang diterima dan digunakan oleh masjid tercatat dengan jelas.

Kata kunci: transparansi; akuntabilitas; laporan keuangan

1. PENDAHULUAN

Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana bantu untuk pengambilan seluruh keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, baik dalam akuntansi sektor publik maupun sektor swasta. Organisasi sektor publik sering kali dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Hal ini bisa terjadi karena mayoritas manajemen organisasi sektor publik masih tergolong lemah, dan bahkan dianggap tidak begitu penting (Halim & Kusufi, 2017).

Organisasi keagamaan termasuk dalam organisasi nirlaba, karena organisasi ini didirikan tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Mengingat semakin berkembangnya umat Islam dan masjid yang semakin banyak di Indonesia, sehingga dana yang dikelola dan dibutuhkan untuk melaksanakan segala kegiatan dan operasional masjid sangat besar. Masjid sebagai organisasi nirlaba sudah sepantasnya harus memperhatikan masalah pencatatan dan pelaporan keuangan karena dana-dana yang dikelola tersebut dibutuhkan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, sarana dan prasarana, serta pembangunan dan pembenahan masjid (Rahayu, 2014).

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang wajib membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini wajar karena sumber dana yang dikelola dan digunakan untuk kegiatan masjid berasal dari sedekah, sumbangan, infaq atau bentuk bantuan sosial lainnya. Selain itu, organisasi masjid harus transparan terhadap masyarakat untuk kemudahan dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan masjid yang benar. Informasi tersebut bisa diakses siapa saja dengan suatu mekanisme tertentu, sehingga tidak disalahgunakan oknum-oknum yang memiliki niat buruk terhadap organisasi. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar karena menjadi sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi masjid kepada masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid (Rahayu, 2014).

Akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjalankan suatu organisasi nirlaba, dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba harus dilakukan dengan transparan, sesuai fakta, dan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi informasi yang disampaikan. Dalam pengelolaan organisasi nirlaba sikap amanah harus dilakukan menyangkut kejujuran dan dapat dipercaya, supaya selalu dapat dipercaya untuk menjalankan suatu amanah tersebut. Karena bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya kepada umat dan para donatur akan tetapi pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika tidak jujur dalam perkataan maupun perbuatan tentu sangat merugikan pihak lain. Islam telah menjelaskan bahwa perintah menyampaikan amanah ada dalam QS. An-Nisa/4:58. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus memiliki sikap amanah, ketika menyampaikan sesuat harus jujur dan tidak ada yang disembunyikan terutama jika kita mendapat amanah dari masyarakat setempat untuk mengelola keuangan organisasi nirlaba.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi nirlaba diharapkan dapat mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan. Untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan, pengelola memiliki kewajiban melaporkan dan menjelaskan setiap aktivitas transaksi keuangan yang sedang terjadi baik itu dana masuk ataupun keluar. Adanya transparansi dimaksudkan sebagai keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan. Sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai macam tindak pencucian uang yang sedang marak terjadi pada organisasi nirlaba (Sitorus et al., 2013).

Berbagai tindak kecurangan, penggelapan dan penyelewengan dana masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus penggelapan dana kas Masjid Raya Sultan Riau yang dilakukan oleh bendahara masjid sebesar Rp 617.235.000,-(Presmedia.id, 2020). Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Masjid Al Ghuroba Pakuwon Mall yaitu seorang bendahara takmir masjid yang terbukti bersalah menggelapkan dana infaq sebesar Rp 266.000.000,- dan akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Sindonews, 2018).

Berdasarkan kasus-kasus penggelapan dan penyelewengan dana masjid diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan belum terlaksana dengan baik secara transparan dan akuntabel. Masih ada penyelewengan dan penggelapan dana kas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi, berbeda dengan Masjid Jogokariyan yang ada di Yogyakarta. Karena masjid ini termasuk masjid percontohan nasional dengan kategori Masjid Besar Percontohan Paripurna Tingkat Nasional oleh Kementrian Agama Republik Indonesia pada tahun 2016 (Republika, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Masjid Jogokariyan.

Atas dasar paparan ini maka makna transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid sangat penting untuk dipahami oleh pengelola keuangan masjid supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana masjid karena dana yang dikelola adalah dana umat Islam untuk kemaslahatan masyarakat muslim.

2. LANDASAN TEORI

2.1 TRANSPARANSI

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance* dan salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah entitas yang baik. Transparansi merupakan proses perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang disampaikan secara terbuka (Yuwono, 2005). Hal ini selaras dengan Widyastuti, (2009) transparansi mengacu pada suatu kondisi yaitu seluruh aspek proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka, dapat diketahui dan dipahami dengan mudah oleh *stakeholder*.

Prinsip pokok pelaksanaan transparansi yaitu menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi serta menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut (Sutedjo,

2009). Informasi yang disajikan dan diungkapkan harus lengkap, diantaranya visi, misi, bentuk perencanaan, susunan pengurus, dan hasil dari para donatur dan kegiatan kepada masyarakat. Dalam pengungkapan informasi harus diungkapkan secara terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018). Memiliki media dalam menyampaikan kritik, saran, dan pendapat untuk memperbaiki kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Sutedjo, 2009). Adanya transparansi dalam pengelolaan suatu organisasi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, pengelolaan keuangannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Krina, (2003) ada 4 macam indikator transparansi yaitu pertama, menyajikan informasi tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, serta tanggung jawab dengan jelas. Kedua, mudahnya akses informasi. Ketiga, adanya suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar. Keempat, bekerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah sebagai upaya meningkatkan arus informasi.

2.2 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah mencari jawaban atau informasi terkait dengan suatu pertanggungjawaban atas segala yang telah dilakukan dan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Apabila terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan penelusuran terkait penyimpangan tersebut (Julkarnain, 2018). Tujuan adanya akuntabilitas untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan (Gharte, 2001).

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa, “akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dalam agama, suatu sistem pencatatan dalam sebuah transaksi sebenarnya telah diperintahkan, walaupun secara implisit, agar kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Halim & Kusufi, 2017).

Akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi yaitu, yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum yang terkait mengenai adanya penghindaran penyalagunaan jabatan, yang kedua adalah akuntabilitas proses yang menjelaskan bagaimana proses pelayanan yang cepat dalam pemberian respon, yang ketiga adalah akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan yang keempat adalah akuntabilitas finansial yang berarti pertanggungjawaban suatu

lembaga atau organisasi dalam menggunakan dana secara ekonomis, efisien dan efektif (Silvia & Ansar, 2011).

2.3 PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Pengelolaan keuangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memberikan tugas kepada bawahannya bidang keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan merupakan sebuah tindakan administratif yang berkaitan dengan pencatatan sumber penerimaan dan pengeluaran kas, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber penerimaan dana dalam hal ini penerimaan dana oleh masjid (Purnama, 2012).

Sumber penerimaan-penerimaan dana oleh masjid berasal dari berbagai macam yaitu sumbangan dalam bentuk infaq dan sedekah dari jamaah dan masyarakat sekitar yang biasanya banyak diperoleh pada saat pelaksanaan shalat jumat. Kemudian sumbangan yang berasal dari perorangan atau individu dengan maksud ibadah seperti infaq untuk mendoakan dan mengalirkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, infaq karena nazar, infaq sebagai perwujudan rasa syukur dan lain-lain. Selain itu, sumber keuangan masjid juga didapatkan dari bantuan pemerintah daerah guna sebagai perbaikan bangunan masjid. (Simanjuntak & Januarsari, 2011).

2.4 INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK 35)

ISAK 35 merupakan salah satu Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ISAK 35 mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 April 2019. ISAK 35 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Menurut ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba ada 5 yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menyusun dan memandang teori sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta atau pengumpulan informasi (Indriantoro, 2016). Penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) adalah penelitian terhadap suatu permasalahan berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro, 2016).

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asal (tidak melalui perantara) (Indriantoro, 2016). Sumber data dalam penelitian ini

berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan bendahara Masjid Jogokariyan. Selain itu, juga data laporan keuangan Masjid Jogokariyan.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara merupakan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi literatur, majalah objek penelitian, dokumentasi, dan website objek penelitian. Metode analisis data penelitian ini ada 3 alur penelitian yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1 TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN MASJID JOGOKARIYAN

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang memberikan jaminan dan kebebasan bagi setiap orang untuk mengakses dan memperoleh informasi suatu entitas atau organisasi terutama dalam informasi pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu unsur pengelolaan keuangan yang sangat penting karena memberikan suatu informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan detail atas pengelolaan dana oleh pengelola keuangan dalam suatu organisasi nonlaba.

Dalam suatu organisasi nonlaba pengurus memiliki wewenang untuk mengambil sebuah kebijakan-kebijakan penting yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan, serta keberlanjutan suatu organisasi nonlaba khususnya masjid. Dalam hal ini pengurus masjid harus menyediakan informasi yang lengkap berkaitan dengan pengelolaan masjid dengan menerapkan transparansi pada laporan keuangan sehingga bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut bebas untuk diakses dan mudah didapatkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Masjid Jogokariyan yang menyatakan bahwa

iya... untuk laporan keuangan Masjid Jogokariyan sangat mudah untuk diakses dan didapatkan oleh jama'ah melalui majalah buletin Masjid Jogokariyan, papan informasi, pengumuman setiap jum'at bahkan untuk para donatur dari luar daerah bisa memperoleh laporan keuangan masjid melalui pembelian flashdisk jogokariyan yang sebagian keuntungannya diberikan untuk infaq masjid dan untuk jama'ah yang ingin mendapatkan laporannya secara rinci bisa langsung minta ke saya sebagai bendahara (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Dari penjelasan yang diperoleh dari wawancara tersebut bahwa siapa saja dapat dengan mudah dan berhak untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para

jamaah. Tidak ada hal yang dirahasiakan dari para jamaah dan donatur untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Apabila para jamaah menginginkan laporan keuangan secara detailnya bisa langsung menghubungi bendahara Masjid Jogokariyan. Penerapan prinsip transparansi laporan keuangan dimaksudkan supaya mencegah terjadinya tindak kecurangan dan penggelapan dana oleh oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab pada organisasi nonlaba khususnya masjid.

Pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi pengurus masjid sangat penting karena sebagai tolak ukur bagi pengurus dalam membuat kebijakan dan supaya masyarakat dan para donatur tidak ragu untuk menginfakkan dan mendedikasikan hartanya ke masjid. Hal ini selaras dengan pernyataan bendahara Masjid Jogokariyan yang menyatakan bahwa “Ya sangat penting mas, laporan keuangan itu semacam transparansi dan salah satu alat untuk penentu kebijakan yang diperlukan pengurus. Karena ini terkait dengan kepercayaan dan alat yang dibutuhkan oleh pengurus, tentu ini sangat penting,” (Bendahara Masjid Jogokariyan). Laporan keuangan sangat penting dalam pengelolaan organisasi nonlaba khususnya masjid. Laporan keuangan yang disajikan secara detail dan transparan dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil. Dengan menggunakan data laporan keuangan yang transparan, kebijakan yang diambil oleh takmir masjid menjadi lebih terarah.

Dalam pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan uang infaq, Masjid Jogokariyan memiliki suatu prosedur-prosedur dan biaya-biaya yang dihitung secara profesional untuk menentukan dana anggaran yang dibutuhkan masjid. Dalam hal ini selaras dengan pernyataan dari bendahara Masjid Jogokariyan yaitu:

emm mengenai prosedur dan biaya-biaya yang dibutuhkan masjid kami telah menerapkan sejak tahun 2005 mulai menginisiasi salah satu program kami mas programnya gerakan jamaah mandiri. Disitu kami memperkirakan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan masjid dalam satu tahun periode lalu dibagi per bulan kemudian per pekan kemudian kami bagi lagi dengan kapasitas jamaah masjid dan ketemu per tempat sholat jamaah dan munculah angka infaq yang dibutuhkan per orang per pekan oleh masjid. Lalu disosialisasikan ke jamaah. Jamaah diberitahu bahwa jika mereka berinfaq dengan jumlah tersebut maka termasuk dalam jamaah mandiri jika lebih itu jama'ah pensubsidi dan jika kurang itu jama'ah disubsidi (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana infaq, Masjid Jogokariyan memiliki prosedur-prosedur dan biaya-biaya yang diperhitungkan secara rinci dan profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban dan strategi pengurus Masjid Jogokariyan dalam mengelola keuangan masjid. Hal tersebutlah yang menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat semakin meningkat dalam berinfaq di Masjid Jogokariyan. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan pemasukan infaq yang

sangat signifikan, hingga 400% dan semuanya dihabiskan untuk semakin memaksimalkan layanan masjid untuk jamaah.

Contoh perhitungannya yaitu :

Contoh kebutuhan tahun 2005

Listrik:Rp. 250.000 x 12	=Rp. 3.000.000,-
Air :Rp. 35.000 x 12	=Rp. 420.000,-
HR Kebersihan: Rp425rbx12	=Rp. 5.100.000,-
Khotib Jumat: Rp50rbx4x12	=Rp. 2.400.000,-
Minuman Subuh:Rp500x250x4x12	=Rp. 6.000.000,-
Minuman Jumat	=Rp. 6.000.000,-
HR dan snack Pengajian-pengajian	=Rp.14.400.000,-
Perawatan dan Pengembangan Masjid	=Rp. 5.880.000,-
JUMLAH	=Rp.43.200.000,-
Kebutuhan tiap bulan : Rp 43.200.000,-/12	= Rp 3.600.000,-
Kebutuhan tiap pekan : Rp 3.600.000,-/4	= Rp 900.000,-/jumlah
jamaah masjid 600 orang maka infaq jamaah mandiri sebesar = Rp 1.500,-/orang/pekan.	

Sumber-sumber penerimaan dana Masjid Jogokariyan berasal dari berbagai macam yaitu: donatur tetap, donatur tidak tetap, kotak infaq, zakat maal, sedekah, dan shuffah (penginapan masjid jogokariyan). Pencatatan transaksinya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dibukukan menjadi laporan keuangan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk pemanfaatan dana masjid digunakan untuk berbagai macam yaitu: kebutuhan untuk kegiatan masjid, penyaluran zakat, infaq, sedekah kepada 8 asnaf dan masyarakat sekitar yang membutuhkan, perawatan bangunan masjid dan shuffah, kebutuhan operasional masjid, pembelian perlengkapan dan peralatan, serta insentif para khotib, ustadz kajian, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.

Indikator transparansi yang kedua yaitu mudahnya akses informasi. Dalam hal ini Masjid Jogokariyan memiliki informasi yang sangat mudah diakses. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa informasi laporan keuangan dapat diakses melalui papan informasi, majalah buletin Masjid Jogokariyan yang dicetak setahun sekali, pengumuman setiap jumat.

Indikator yang ketiga yaitu adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar. Didalam sebuah organisasi tentunya pasti ada suatu aturan yang mengatur segala kegiatan organisasi tersebut khususnya organisasi nonlaba yaitu masjid. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bendahara Masjid Jogokariyan yaitu:

Begini mas.. jadi jika ada peraturan yang dilanggar maka untuk mekanisme pengaduannya bisa langsung ke saya atau ke salah satu pengurus yang lain. Dan nanti akan dimusyawarahkan dicari solusi yang terbaik. Baik itu pelanggaran yang dilakukan jamaah ataupun pengurus masjid sendiri, dan bagi pelanggarnya pastinya nanti akan di ajak diskusi secara baik-baik akan pentingnya menta'ati

peraturan yang telah dibuat oleh masjid. Tidak serta merta langsung dikasih sanksi akan tetapi kita ajak ngobrol baik-baik menasehati dengan bijak (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Indikator yang keempat yaitu bekerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah sebagai upaya meningkatkan arus informasi. Dalam hal ini Masjid Jogokariyan memiliki media massa sendiri yaitu buletin Idul Fitri yang bekerjasama dengan beberapa sponsor. Hal ini selaras dengan pernyataan Bendahara Masjid Jogokariyan yaitu:

emmm untuk hal itu kami memiliki media massa sendiri mas, yaitu Buletin Idul fitri yang setiap setahun sekali kami terbitkan dan bekerjasama dengan beberapa sponsor seperti LYNNhotel, UD. Jati Sari, Supono Sport, SENO Hotel, PO. Karya Jasa, Optik mading dan lain-lain (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Masjid Jogokariyan memiliki media massa sendiri untuk penyebarluasan informasi yaitu berupa buletin Idul Fitri yang dicetak setahun sekali dengan bekerja sama beberapa sponsor diantaranya LYNNhotel, UD. Jati Sari, Supono Sport, SENO Hotel, PO. Karya Jasa, Optik mading dan lain-lain.

4.2 AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN MASJID JOGOKARIYAN

Akuntabilitas adalah mencari jawaban atau informasi terkait dengan suatu pertanggungjawaban atas segala yang telah dilakukan dan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Apabila terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan penelusuran terkait penyimpangan tersebut. (Julkarnain, 2018)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pengurus suatu organisasi nonlaba mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan yang ada dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai tanggungjawab kepada masyarakat dan donatur. Akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi nonlaba. Dalam melaksanakan segala aktivitas organisasi nonlaba harus ada pertanggungjawabannya sebagai bentuk pertanggungjawaban yaitu adanya laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus (Yuwono, 2005). Sebagaimana pernyataan dari Bendahara Masjid Jogokariyan berikut:

Menurut saya, Masjid Jogokariyan sendiri ini sudah baik dalam sisi akuntabilitasnya. Walaupun masjid termasuk organisasi nonlaba yang tidak bertujuan untuk mencari laba tapi kami sebagai pengurus harus tetap menyajikan sebuah laporan keuangan yang rinci karena pertanggungjawabannya besar kalau difikir bukan hanya kepada jamaah atau donatur tetapi juga kepada Allah SWT yang selalu mengawasi kita. Tapi dalam pembuatan laporan keuangannya kami belum sesuai dengan ISAK 35. Mungkin kedepannya kami akan mempelajari dulu (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan Masjid Jogokariyan belum mengikuti pedoman dari ISAK 35. Karena kurangnya pemahaman dari bendahara selaku yang membuat laporan keuangan mengenai ISAK 35. Akuntabilitas tidak hanya sebatas pertanggungjawaban saja. Tapi perlu diperhatikan juga cara penyajian laporan keuangan untuk organisasi nonlaba yang telah diatur dalam ISAK 35. Dengan berpedoman pada ISAK 35 yang laporan keuangannya terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut diharapkan nantinya laporan keuangan Masjid Jogokariyan lebih mudah dipahami, mempunyai kualitas, dan mempunyai relevansi sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan masjid.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengurus suatu organisasi nonlaba. Akuntabilitas menunjukkan bukti bahwa dana yang disumbangkan oleh donatur dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan profesional. Di dalam laporan keuangan mencakup informasi mulai dari penerimaan dana sumbangan sampai pemanfaatan dana (pengeluaran).

Akuntabilitas yang dimiliki setiap pengurus dan anggota suatu organisasi mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pengurus suatu organisasi wajib melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya dalam suatu organisasi nonlaba (Wirayuni et al., 2015). Implementasi akuntabilitas pada laporan keuangan organisasi non laba bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, memiliki kredibilitas tinggi, dan detail sehingga dalam pengambilan keputusan dapat ditentukan dengan pertimbangan aktivitas transaksi yang ada dalam laporan keuangan organisasi nonlaba.

Akuntabilitas memiliki arti pihak pemegang amanah (agent) yang mempunyai kewajiban dalam pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan semua aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Ada beberapa indikator akuntabilitas menurut Krina (2003) yaitu pertama kelengkapan dan akurasi informasi berkaitan dengan mekanisme dalam mencapai suatu program, kedua konsistensi dan kelayakan dari target operasional maupun prioritas, ketiga penyebarluasan informasi melalui media massa, keempat akses publik pada informasi.

Indikator pertama yaitu kelengkapan dan akurasi informasi berkaitan dengan mekanisme dalam mencapai suatu program. Berkaitan dengan hal ini Masjid Jogokariyan telah memiliki informasi mengenai aktivitas-aktivitas masjid dalam menjalankan program-program masjid dengan sangat lengkap dan akurat. Sebagaimana dalam pernyataan wawancara kepada Bendahara Masjid Jogokariyan yaitu:

Begini mas.. Jadi untuk masalah kelengkapan dan akurasi informasi saya rasa Masjid Jogokariyan ini sudah bagus. Karena dalam Laporan Keuangan pun sudah saya susun secara rinci walaupun

masih berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Salah satu contoh mekanismenya itu ada di program masjid yaitu program gerakan jamaah mandiri yang dimana melalui proses perhitungan dana yang dibutuhkan masjid kemudian di breakdown dibagi dengan 12 bulan, lalu dibagikan lagi 4 minggu setiap bulan dan jumlah kapasitas jamaah masjid sehingga menghasilkan suatu angka dimana angka itu merupakan sejumlah infaq yang harus dikeluarkan oleh jamaah. Kami tidak memaksa, tetapi kami memberikan edukasi bahwa jika infrastrukturnya sejumlah angka yang ditentukan maka disebut jamaah mandiri jika kurang dari disebut jamaah disubsidi jika lebih dari disebut jamaah pensubsidi (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa untuk kelengkapan dan akurasi informasi dari Masjid Jogokariyan ini sudah bagus, lengkap dan akurat. Karena dalam laporan keuangan Masjid Jogokariyan sudah disusun secara rinci walaupun belum berpedoman pada ISAK 35. Dan dalam mengelola keuangannya itu ada mekanisme perhitungannya dalam setiap program. Salah satunya program gerakan jamaah mandiri yang telah dijelaskan diatas. Dengan program tersebut berdampak pada meningkatnya jiwa berinfaq dan bersedekah para jamaah masjid. Pemasukan infaq mengalami peningkatan secara signifikan.

Indikator kedua yaitu konsistensi dan kelayakan dari target operasional maupun prioritas. Masjid Jogokariyan ini memiliki prinsip dalam pengelolaan masjid bahwa dalam mengelola masjid itu bukan fokus pada fisik masjidnya tetapi fokus pada jamaahnya. Berkaitan dengan target operasional maupun prioritas yang konsisten dan layak, Masjid Jogokariyan ini memiliki tahapan-tahapan target operasional dan prioritas didalam salah satu programnya yaitu program *skenario planning* Masjid Jogokariyan. Program ini berawal dari cita-cita untuk memakmurkan masjid. Program memiliki 3 tahapan target setiap 5 tahun ke depan yaitu bertambahnya shof jamaah sholat wajib. Sebagaimana yang disampaikan Bendahara Masjid Jogokariyan yaitu:

emm jadi seperti ini mas, Masjid Jogokariyan ini memiliki suatu program yang dinamakan skenario planning Masjid Jogokariyan. Nah, program ini merupakan sarana untuk target kami yaitu setiap 5 tahun ke depan orang yang ikut berjamaah sholat wajib bertambah terus. Nanti saya berikan untuk rincian program ini (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa konsistensi dan kelayakan dari target operasional maupun prioritas Masjid Jogokariyan sangat baik. Terbukti dengan adanya strategi dalam mencapai suatu target yaitu yang ada dalam program *skenario planning* Masjid Jogokariyan antara lain skenario *planning* yang pertama (2000-2005) memiliki tema Jogokariyan Islami yaitu dengan cara merubah masyarakat Jogokariyan yang semula kaum abangan menjadi kaum islami, mengarahkan para pemuda yang suka mabuk dijalan untuk diarahkan ke masjid, mengajak warga yang belum sholat untuk sholat dan yang belum berjamaah diajak untuk berjamaah. Kemudian mengajak anak-

anak untuk beraktivitas di masjid, menjadikan para pemabuk menjadi keamanan masjid, dan target jamaah sholat subuh sejumlah 25% jamaah sholat jumat.

Skenario planning yang kedua (2005-2010) bertema Jogokariyan Darusalam I yaitu dengan cara menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk berkomunitas di masjid, target dari jamaah subuh menjadi 50% dari jamaah sholat jumat, meningkatkan dan memperbanyak pelayanan, menyejahterakan masyarakat sekitar terutama jamaah melalui lumbung masjid, membuka sebuah klinik, memberikan beasiswa bagi penuntut ilmu yang kurang mampu, membantu modal usaha untuk para pedagang.

Skenario Planning ketiga (2010-2015) bertema Jogokariyan Darusalam II, yaitu dengan cara menyelesaikan orang yang belum shalat jamaah, menambah kualitas keagamaan masyarakat, meningkatkan jumlah jamaah sholat subuh menjadi 75% atau perkiraan 14 shaf dari jamaah shalat jumat, merekrut para mantan pemabuk menjadi bagian dari Masjid (BBM, relawan Masjid, dll).

Indikator ketiga yaitu penyebarluasan informasi melalui media massa. Dalam penyebarluasan informasi, Masjid Jogokariyan ini memiliki website dan buletin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Masjid Jogokariyan dalam wawancara berikut ini:

ohh kalo itu sih kami punya website dan buletin idul fitri. Di website kami sajikan informasi profil masjid, kontak masjid, aktivitas-aktivitas kegiatan masjid dan materi-materi manajemen masjid yang baik dan benar. Nah untuk buletinnya itu kita sajikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas kegiatan masjid, materi-materi keislaman dan khususnya laporan keuangan. Sebagai bentuk tanggungjawab kita sebagai pengurus masjid (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam hal penyebarluasan informasi melalui media massa, Masjid Jogokariyan memiliki website dan buletin. Website digunakan untuk penyebarluasan informasi profil masjid, kontak masjid, aktivitas-aktivitas kegiatan masjid dan materi-materi manajemen masjid yang baik dan benar. Sedangkan untuk buletin Idul Fitri itu menyebarkan informasi mengenai aktivitas-aktivitas kegiatan masjid, materi-materi keislaman dan khususnya laporan keuangan Masjid Jogokariyan.

Indikator yang keempat yaitu akses publik pada informasi. Masjid Jogokariyan memiliki manajemen masjid yang baik sehingga akses publik terhadap informasi sangat mudah diakses. Dapat melalui website, buletin idul fitri, papan informasi, dan lain-lain. Sebagaimana pernyataan dari Bendahara Masjid Jogokariyan berikut ini :

emm... untuk akses publik pada informasi masjid, kami sudah melakukan yang terbaik sehingga informasi mudah diakses oleh publik baik itu jamaah masjid maupun donatur. Dapat melalui website, buletin idul fitri, papan informasi, dan lain-lain. Itu semua

sebagai tanggungjawab kami sebagai pengurus masjid (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa akses publik terhadap informasi sangat mudah. Masjid Jogokariyan memiliki website, buletin idul fitri, papan informasi dan lain-lain untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan khususnya laporan keuangan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab pengurus masjid supaya rasa kepercayaan masyarakat meningkat dan menimbulkan rasa nyaman untuk senantiasa memakmurkan masjid.

4.3 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MASJID JOGOKARIYAN DENGAN ISAK

35

Pada tahun 2008 Ikatan Akuntan Indonesia menyusun suatu pernyataan standar akuntansi keuangan no. 45 (PSAK No. 45) tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba untuk organisasi nirlaba dan bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna. Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Beorientasi Nonlaba. ISAK 35 ini menggantikan PSAK 45 sebagai pedoman yang baru bagi organisasi nonlaba.

Masjid merupakan sarana peribadahan dan kegiatan umat Islam yang memerlukan pelaporan keuangan yang efektif dan efisien hal ini untuk menunjang ibadah dan kegiatan masjid. Masjid termasuk dalam organisasi nonlaba yang diharapkan untuk penyajian laporan keuangannya menggunakan pedoman ISAK 35. Adapun di ISAK 35 sendiri terdiri dari 5 laporan keuangan yaitu : laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, catatan atas laporan keuangan.

ISAK 35 merupakan standar atau pedoman pelaporan keuangan organisasi nonlaba yang masih terdengar asing dan baru bagi bendahara masjid. Untuk bendahara Masjid Jogokariyan pernah dengar saja untuk ISAK 35 ini tapi belum tahu mengenai rincian aturan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba. Sebagaimana dalam wawancara dengan bendahara Masjid Jogokariyan berikut ini:

Saya sendiri sudah pernah dengar mengenai pedoman tersebut. Tapi saya belum tahu bagaimana rinciannya aturan dalam penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba yang terdapat di ISAK 35. Jadi kami buat laporannya cuma penerimaan dan pengeluaran saja mengikuti kepengurusan sebelumnya karena kami belum tau dan belum paham mengenai ISAK 35 tersebut (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa Masjid Jogokariyan ini belum menggunakan standar pelaporan keuangan organisasi nonlaba dari ISAK 35. Untuk pedoman ISAK 35 ini sebenarnya bendahara Masjid Jogokariyan sudah pernah dengar, tetapi belum mengetahui secara rinci mengenai aturan tersebut. Sehingga untuk pelaporannya belum menggunakan

ISAK 35 dan masih berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja tapi disajikan secara rinci.

Bendahara masjid biasanya bukan dari latar belakang di bidang keuangan. Bendahara Masjid Jogokariyan juga tidak berasal dari latar belakang bidang keuangan tapi pernah belajar akuntansi pada saat masih SMP. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Masjid Jogokariyan bahwa, “Tidak mas saya ini bukan dari latar belakang keuangan. Tapi dulu pernah ada pelajaran akuntansi saat SMP,” (Bendahara Masjid Jogokariyan).

Laporan keuangan Masjid Jogokariyan belum disajikan berdasarkan ISAK 35. Dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 terdapat 5 jenis laporan keuangan yang harus disajikan yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, laporan penghasilan komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut penyajian laporan keuangan yang telah direkonstruksi oleh peneliti berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Jogokariyan dengan menggunakan data laporan penerimaan dan pengeluaran Masjid Jogokariyan per 30 April 2020:

Penyajian Laporan Posisi Keuangan Menurut ISAK 35 pada Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 April 2020
(Dalam Rupiah)

	CATATAN	30-Apr-20
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	Rp	365.046.425
Perlengkapan	Rp	268.790.066
Sewa dibayar dimuka	Rp	178.650.000
Total Aset Lancar	Rp	812.486.491
Aset Tidak Lancar		
Peralatan	Rp	523.062.890
Granit	Rp	80.900.000
Total Aset Tidak Lancar	Rp	603.962.890
Total Aset		Rp 1.416.449.381
Liabilitas		
Total Liabilitas	Rp	-
Aset Neto		
Aset Neto Tanpa Pembatasan		
Surplus Akumulasian	Rp	1.416.449.381
Aset Neto Dengan Pembatasan Permanen	Rp	-
Aset Neto Dengan Pembatasan Temporer	Rp	-
Total Aset Neto	Rp	1.416.449.381
Total Liabilitas dan Aset Neto	Rp	1.416.449.381

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menyajikan aset, liabilitas dan aset neto. Berikut pembahasannya :

1. Aset

Aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan data laporan keuangan Masjid Jogokariyan yaitu terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, perlengkapan dan sewa dibayar dimuka. Kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan jumlah atau total aset bersih pada akhir tahun. Kas dan setara kas terdiri dari penerimaan-penerimaan dana Infaq, Shodaqoh, Zakat Maal, dan shuffah serta pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada 1 periode. Perlengkapan yang disajikan merupakan perlengkapan yang dibeli dan dibutuhkan masjid selama 1 periode. Sewa dibayar dimuka terdiri dari beberapa transaksi yaitu sewa ruko, sewa rumah, sewa ambulans, dan lain-lain. Untuk aset tetap yang disajikan adalah peralatan yang dibeli selama 1 periode dan granit yang pada saat periode tersebut ada pembelian dan pemasangan granit di halaman masjid. Untuk tanah dan bangunan tidak disajikan dalam aset tetap karena belum diketahui nilai buku dari tanah dan bangunan tersebut.

2. Liabilitas

Untuk liabilitas tidak disajikan karena Masjid Jogokariyan tidak memiliki saldo kewajiban (liabilitas) selama 1 periode.

3. Aset Neto

Aset neto Masjid Jogokariyan terdiri dari aset neto tanpa pembatasan. Nilai aset neto tanpa pembatasan terdiri dari saldo awal aset bersih dijumlahkan dengan semua pendapatan infaq, shadaqah, dan zakat maal kemudian dikurangi dengan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, pertama, transparansi terhadap laporan keuangan Masjid Jogokariyan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang disusun oleh pengurus masjid khususnya bendahara secara rinci dan memberikan kemudahan akses informasi keuangan kepada para jamaah dan donatur melalui papan informasi dan buletin Idul Fitri. Kemudian adanya mekanisme pengaduan yang baik ketika ada peraturan yang dilanggar.

Kedua, akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam pengelolaan organisasi nonlaba khususnya Masjid Jogokariyan telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya laporan keuangan yang disusun secara rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas pengelolaan dana umat. Adanya kelengkapan dan akurasi informasi yang disampaikan oleh pengurus Masjid Jogokariyan dalam pencapaian suatu program yaitu terdapat perhitungan yang akurat terkait infaq yang dibutuhkan masjid dalam salah satu program masjid yaitu gerakan jamaah mandiri. Adanya konsistensi dan kelayakan target operasional maupun

prioritas masjid terbukti dengan adanya skenario planning dari pengurus masjid untuk meningkatkan jumlah orang yang sholat berjamaah di Masjid Jogokariyan. Adanya media massa yang dimiliki Masjid Jogokariyan yaitu buletin Idul Fitri yang bekerjasama dengan beberapa sponsor dan *website*.

Sebaiknya untuk kedepannya pengurus Masjid Jogokariyan dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan tidak hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja, tapi dilakukan dengan lebih baik dan detail sesuai dengan ISAK 35 bahwa laporan keuangan organisasi nonlaba itu mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga nantinya akan lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan khususnya kepada para donatur. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi kepada para pengurus masjid mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid dengan berpedoman ISAK 35. Sehingga laporan yang dihasilkan akan lebih detail dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghartey, J. B. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat. (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Indriantoro, D. N. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. BPFE-Yogyakarta.
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2), 1–3.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. <https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loinalolo-krina-p.html>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Presmedia.id. (2020). *Gelapkan Uang Kas Masjid Sultan, Diperiksa Hakim, Zulkarnain Mengaku Gunakan Rp.617Juta*. <https://presmedia.id/berita->

18434/gelapkan-uang-kas-masjid-sultan-diperiksa-hakim-zulkarnain-mengaku-gunakan-rp-617juta.html

- Purnama, Y. A. (2012). Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan pada Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso). *Jurnal Akutansi*, 45, 1–10.
- Rahayu, R. A. (2014). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akutansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638.
- Republika. (2017). *Masjid Jogokaryan Yogyakarta Percontohan Nasional*. <https://www.republika.co.id/berita/ojtr3x313/masjid-jogokaryan-yogyakarta-percontohan-nasional>
- Silvia, J., & Ansar, M. (2011). Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis Pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu). *Simposium Nasional Akutansi XIV Aceh 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 21-22 Juli 2011, 21–22.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akutansi XIV Aceh 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 21-22 Juli 2011, 21–22.
- Sindonews. (2018). *Gelapkan Uang Masjid, Subiyanto Divonis 2 Tahun 6 Bulan*. *Penjara*. <https://daerah.sindonews.com/berita/1322931/23/gelapkan-uang-masjid-subiyanto-divonis-2-tahun-6-bulan-penjara>
- Sitorus, D., Nasution, B., & Windha, W. (2013). Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Transparency*, 1(1), 1–7.
- Sutedjo. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009 [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/24292/>
- Widyastuti, M. (2009). Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Paradigma*, 10(2), 149–158.
- Wirayuni, K. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengungkapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Kelompok Nelayan Dharma Samudra Tukadmungga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha*, 3(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4781>
- Yuwono, S. (2005). Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publishing.